

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

BUKU

- A. Muin Fahmal, *Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*, Cet. 2 (Yogyakarta: Total Media, 2008).
Adriaan Bedner. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, kerjasama Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
Bambang Utoyo. *Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara*. Unila., 2013.

- Brabazon, Honor, ed. *Neoliberal Legality: Understanding the Role of Law in the Neoliberal Project*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017.
- Carlos Santiso. "Parliaments and Budgeting: Understanding the Politics of the Budget." *United Kingdom Department for International Development & Johns Hopkins School of Advanced International Studies*, 16 Januari 2006.
- Carroll, Toby. *Delusions of development: the World Bank and the post-Washington consensus in Southeast Asia*. Critical studies of the Asia-Pacific series. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Christopher Pierson. *Beyond the Welfare State? : The New Political Economy of Welfare*. 3rd ed. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2007.
- Darmawan triwibowo Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- David Kennedy. *The "Rule of Law," Political Choices, and Development Common Sense*. Eds. The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Dian Puji Nugraha Simatupang. *Paradoks Rasionalitas : Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2011.
- Dr. Aili Papang Hartono, S.H., M.Kn. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Jakarta: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2020.
- Ejan Mackaay. *Law and Economics for Civil Law System*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2013.
- Eka Merdekawati Djafar, Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara : Teori dan Praktik*. Edisi 4, Cetakan ke-7. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Fajar Sugianto. *Butir-butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2013.
- . *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2014.
- Guido Calabresi. *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection*. New Haven: Yale University Press, 2016.
- Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur, Malaysia: International Law Book Services, 1994.
- Hyde. *Government Budgeting: Theory, Process, and Politics*. Canada: Wadsworth, 1991.
- Ikhwan Fahroji, SH., MH. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Intrans Publishing, 2016.
- Indriyanto Seno Adji, Maria G.S. Soetopo. *Economic Analysis of Law (Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah)*. Jakarta: Diadit Media, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Karina Dwi Nugrahati Putri, Richo Andi Wibowo. *Penugasan Pemerintah kepada*

- BUMN dalam Penyelenggaraan Infrastruktur: Solusi atau Masalah?*
Jakarta: Kencana, 2021.
- Lee, Pei-Shan. *“Democratization and the Demise of the Developmental State.” Challenges to Taiwan’s Democracy in the Post-Hegemonic Era.*, Taipei, 2002.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Maria S.W. Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Max Travers, Reza Banakar. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing, 2005.
- Mohammad Hatta. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Vol. PKPN Jakarta Raya. Jakarta, 1971.
- Muhammad Akbar, Mahfud Sholihin. *Meneropong BUMN : Kasus-Kasus Etika Bisnis dan Akuntansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Ed. 2., cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Paul Spicker. *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. London: Catalyst, 2002.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. 10 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Prof. Dr. Siitua Arief. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
- Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. *“Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.” Badan Pengkajian MPR RI Cetakan Pertama (2020): 57.*
- Refly Harun. *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara (Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol dan Pengawasan)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Richard A. Posner. *Economics Analysis of Law*. Fifth Edition. New York, USA: Awolters Kluwer Company, 1998.
- Richard A.Posner. *Economic Analysis Of Law*. Fourth Edition. Boston, Toronto, London: Little Brown and Company, 1992.
- Richo Andi Wibowo, S.H.,LL.M., *Kontrak Pemerintah : Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. 7. impr. Southeast Asia Publications Series 13. North Sydney: Allen & Unwin, 1991.
- Safri Nugraha, “Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan

- yang Baik” (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007).
- Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Sri Edi Swasono. “Indonesia is Not For Sale : Sistem Ekonomi Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat : demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics : catatan akhir tahun.” Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007.
- Toby Carroll. *The World Bank’s socio-institutional neoliberalism: A case study from Indonesia*. Singapore: The Workshop on the World Bank, Lee Kwan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, 2006.
- Toegarisman, M. Adi. *Pemberantasan Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kompas Media, 2018.
- Tom Gunadi. *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Vedi R. Hadiz. *Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Wildacsy. *The New Politics of the Budgetary Process 5thed*. New York: Pearson, 2000.

JURNAL

- Agung Dinarjito. “Menilai kesehatan BUMN konstruksi yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebagai akibat meningkatnya proyek infrastruktur Pemerintah.” *Jurnal Substansi* Volume 2 Nomor 1 (2018). <https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.263>.
- Agung Wardana. “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.” *Undang: Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 1 (2022): 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1>.
- Agustin Widjiastuti, “PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN,” *Perspektif* 22, no. 2 (31 Mei 2017): 96, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>.
- Ah Maftuchan. “Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia.” *Jurnal HAM* Volume XIV (2018): 114.
- Amir Faisal, Fitriah Faisal, dan Endah Widyastuti. “Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Halu Oleo Law Review* Volume 6 Issue 1 (Maret 2022).
- Anggoro, Syahriza Alkohir. “RULE OF LAW, NEOLIBERALISME DAN PROYEK REFORMASI HUKUM WORLD BANK: PERSPEKTIF CRITICAL LEGAL STUDIES.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): 267. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2502>.
- Arif Firmansyah. “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia.” *Jurnal Hukum : Syiar Hukum* Volume 14 Nomor 2 (2012). <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1451>.

- Carla J. Stoffle. "The Politics of Budgeting." *The Bottom Line* Vol. 6, No. 2 (2007).
- Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler. "A Behavioral Approach to Law and Economics." *Stanford Law Review* Vol. 50: 1471 (1998).
- Dyah Amalia. "Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008 – 2017)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019, 3.
- Fachrizal Afandi. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Ginsburg, Tom. "Dismantling the 'Developmental State'? Administrative Procedure Reform in Japan and Korea." *The American Journal of Comparative Law* 49, no. 4 (2001): 585. <https://doi.org/10.2307/841051>.
- Grewal, David Singh, and Jedediah Purdy. "INTRODUCTION: LAW AND NEOLIBERALISM. Law and Contemporary Problems" Volume 77 Number 4 (2014): 1–23. <http://www.jstor.org/stable/24244645>.
- Hadian Afriyadi. "Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Al'Adl* Volume IX Nomor 1 (April 2017): 2.
- Isdian Anggraeny. "Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945." *Jurnal Legality* Vol. 24, No. 1 (Maret 2016).
- John Wanna, Joanne Kelly. "New Public management and The Politics of Government Budgeting." (*International Public Management Review* Vol. 1 Issue 1 (2000).
- John Williamson. "The Strange History of the Washington Consensus." *Journal of Post Keynesian Economics* Volume 2 No 2 (2004): 195–206. <http://www.jstor.org/stable/4538920>.
- Kartika Nuarisqi dan Roby Syaiful Ubed. "Analisis Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Terhadap Kinerja Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2012-2018." *Indonesia Rich Journal* Volume 1, Nomor 2 (2020): 63–72.
- Kristianus Pramudito Isyunanda. "Pemanfaatan Law and Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada* Volume 34, Nomor 1 (2022).
- Marisi. "Analisis Yuridis Pentingnya Pengawasan Otoritas terhadap BUMN Go Public." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 2 (Juli 2017): 277–95.
- Marlina Purba. "Studi Sosio Legal dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 51 No. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3018>.
- Moh. Eddy D. Soeparno. "Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura" *Politica* Vol. 13 No. 1 (Mei 2022).
- Muhammad Ikhsan Alia, Beni Kurnia Illahi. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK." *Jurnal Integritas* Volume 3 Nomor 2 (Desember 2017).

- Murni. "Analisis Ekonomi terhadap Pasal--Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal Arena Hukum* Volume 6, Nomor 1 (April 2012).
- Oman Sukmana. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol* Vol 2 No.1 (Juli 2016): 103–22.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Özgün, Gizem, dan Antoine Dolcerocca. "Bringing classes back into poverty discussions." *Frontiers in Sociology* 7 (17 Januari 2023): 969750.
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.969750>.
- Ratih Nur Pratiwi. "Politisasi Anggaran Sektor Publik." *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya* Vol. 1 No. 2 (2010).
- Reza Syawawi. "Diskresi dan Potensi Korupsi dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 18 Nomor 3 (September 2021): 419–35.
- R.H Coase. "The Problem of Social Cost." *The Journal of Law & Economics* Volume 3 (1960): 1–44. <http://www.jstor.org/stable/724810>.
- Ridwan Khairandy. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 20 (Januari 2013).
- Royston Greenwiid, C. R. Hinings and Stewart Ranson. "The Politics of the Budgetary Process In English Local Government." *Jurnal: Political Studies* Vol. XXV, No. 1 (1977).
- Siti Zulaekha, Isti Sulistyorini. "Economic Analysis of Law pada Perubahan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus PT. Freeport Indonesia" Vol. 17, No. 2 (2017).
- Sofia L. Rohi. "Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurnal Politika* Volume 4 Nomor 1 (2013).
- Sumanto. "Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Humainora* Vol. 8, No. 2 (2008).
- Yusuf Hidayat, Rian Hari Anggoro, dan Sadino. "Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah." *Jurnal Spektrum Hukum* Volume 20, No 02 (Oktober 2023).
<https://doi.org/10.56444/sh>.

MEDIA INTERNET

- Agnes Theodora. "Jalur Ekonomi Indonesia Kian Terjal Menuju Negara Maju." Jakarta: Kompas.ID, 2 Juni 2024.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/05/ekonomi-jalan-di-tempat-ri-masih-jauh-dari-ambisi-negara-maju>
- . "Lampu Kuning Utang BUMN." Jakarta: Kompas.ID, 22 April 2021.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/22/lampu-kuning-utang-bumn>.
- . "Pengendalian Infrastruktur agar Tak Menambah Beban Utang." Jakarta:

- Kompas.ID, 18 April 2021.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/18/infrastruktur-dikendalikan-agar-tak-menambah-beban-utang>.
- Andre Barahamin. “Infrastructure-First’ Approach Causes Conflict in Indonesia,” 5 November 2022. <https://chinadialogue.net/en/business/infrastructure-first-approach-causes-conflict-in-indonesia/>.
- Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,dkk, “Restatement Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (Jakarta: Judicial Sector Support Program, 2016), <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Slide-Restatement-TUN.pdf>.
- Chandra M.Hamzah, dkk, “Peraturan Omnibus BUMN Mengutamakan Program Penunjukan Langsung Dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan” (Jakarta: Assegaf Hamzah & Partners, 25 Mei 2023), <https://www.ahp.id/clientalert/AHPClientUpdate-25May2023-Bahasa.pdf>.
- Dionisio Damara. “Akhir Tak Manis Proyek Strategis.” Jakarta: Ortax : Media Komunitas Perpajakan Indonesia, 14 Juni 2023.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18547>.
- Dwi Aditya Putra. “Merunut Akar Masalah Utang Jumbo BUMN Karya: Apa Solusinya?” Jakarta: Tirto.id, 8 November 2023. <https://tirto.id/merunut-akar-masalah-utang-jumbo-bumn-karya-apa-solusinya-gNXh>.
- Dwi Aditya Putra, “PIK 2 & BSD Masuk Proyek Strategis Nasional, Untung Apa Buntung?” (Jakarta: Tirto.id, 4 April 2024), 2, <https://tirto.id/pik-2-bsd-masuk-proyek-strategis-nasional-untung-apa-buntung-gXxo>.
- Gianie. “Rempang, Proyek Strategis Nasional, dan Luka Sosial.” Jakarta: Kompas.ID, 18 September 2023.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional-dan-luka-sosial>.
- Haryo Limanseto. “Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas.” Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 10 Maret 2023.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas>.
- Hendrik Khoirul Muhid. “PPATK Temukan 36,67 Persen Dana PSN Masuk Kantong Pribadi, Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional Pemerintah.” Jakarta: Tempo, 1 November 2024.
<https://nasional.tempo.co/read/1819973/ppatk-temukan-3667-persen-dana-psn-masuk-kantong-pribadi-berikut-daftar-proyek-strategis-nasional-pemerintah>.
- Hendry Julian Noor. “Tugas Khusus BUMN.” Jakarta: Kompas.ID, 30 Oktober 2020. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/30/tugas-khusus-bumn>.
- Institute for Demographic and Poverty Studies. “Beban Utang BUMN Karya.” Jakarta, 15 Agustus 2023. <https://ideas.or.id/2023/08/15/beban-utang-bumn-karya/>.
- “Jokowi Minta Seluruh PSN Rampung Paling Lambat Semester I 2024.” Jakarta:

- CNN Indonesia, 14 September 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230913205042-532-998743/jokowi-minta-seluruh-psn-rampung-paling-lambat-semester-i-2024>.
- Kementerian Keuangan. “Proyek Strategis Nasional, Dari Kita Untuk Bangsa.” Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 14 Maret 2023.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Kajian Kebijakan.” Jakarta: KPPIP dan Kemenko Perekonomian, 14 Desember 2017.
<https://ekon.go.id/source/publikasi/7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx>.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. “Laporan KPPIP Semester II Tahun 2022.” <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>.
- . “Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia,” t.t.
<https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>.
- Koran Tempo. “Bagaimana Penyelesaian Utang BUMN Karya,” 15 Agustus 2023.
<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483851/bagaimana-penyelesaian-utang-bumn-karya>.
- Lisnawati. “Permasalahan Utang BUMN Karya dan Upaya Mengatasinya.” Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, t.t. <https://bumn.go.id/penggerak/detail/akselerator-proyek-strategisnasional-1105670322,bumn>.
- Muhammad Idris. “Meski Didera Utang Rp 84 Triliun, Gaji Karyawan Waskita Tetap Dibayar.” Jakarta: Kompas.com, 8 Agustus 2023.
<https://money.kompas.com/read/2023/08/08/195744026/meski-didera-utang-rp-84-triliun-gaji-karyawan-waskita-tetap-dibayar?page=all>
- Nafiatul Munawaroh, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya” (Jakarta: Hukumonline.com, 27 Juli 2023), https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/#_ftn1.
- Ndaru Hidayatullah, S.H, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres” (Jakarta: Hukumonline.com, 27 Oktober 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/>.
- “Omnibus Law Cipta Kerja: Peneguhan Hukum sebagai Instrumen Akumulasi Kapital.” Jakarta: IndoProgress.com, 10 Agustus 2020.
<https://indoproggress.com/2020/10/omnibus-law-cipta-kerja-peneguhan-hukum-sebagai-instrumen-akumulasi-kapital/>.
- Redaksi Kumparan Bisnis. “Morat-marit BUMN Karya.” Jakarta: Kumparan, 6 Desember 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/morat-marit-bumn-karya-20aSFbBiXnb/1>.
- Redaksi Tempo, “Aroma Balas Budi Proyek Strategis Nasional” (Jakarta: Koran

- Tempo, 28 Maret 2024), <https://koran.tempo.co/read/cover-story/487875/pik-dan-bsd-masuk-psn>
- Ridwan Aji Pitoko. “Etatisme Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, BUMN Untung atau Rugi?” Jakarta: Kompas.com, 18 Mei 2018. <https://pemilu.kompas.com/read/2018/05/18/080300726/etatisme-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi-bumn-untung-atau-rugi->
- Relfie Miftahul Jannah. “Derita BUMN: Terima Proyek Ambisius Pemerintah, Terjebak Utang.” Jakarta: Tirto.id, 12 Agustus 2021. <https://tirto.id/derita-bumn-terima-proyek-ambisius-pemerintah-terjebak-utang-gl6R>.
- Reza Syawawi, “Korupsi Proyek Strategis” (Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW), 4 Agustus 2017), <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-proyek-strategis>
- Romys Binekasari, “Wamen Tiko Harap Pemerintah Bayar Utang ke BUMN Lebih Cepat” (Jakarta: CNBC Indonesia, 20 September 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230920185826-17-474202/wamen-tiko-harap-pemerintah-bayar-utang-ke-bumn-lebih-cepat>.
- Ronny P. Sasmita, “Reformasi Institusional Kementerian BUMN” (Jakarta: Tempo, 24 Mei 2022), <https://koran.tempo.co/read/opini/473958/kepentingan-politik-di-kementerian-bumn-dan-macetnya-reformasi-bumn>.
- Ruisa Khoiriyah, “Transparency International: Proyek Kereta Cepat Berisiko Korupsi” (Jakarta: Bloomberg, 21 September 2023), <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/15978/transparency-international-proyek-kereta-cepat-berisiko-korupsi>.
- Tempo. “Krisis Modal BUMN Karya.” Jakarta, 25 September 2022. <https://majalah.tempo.co/read/opini/167000/mengapa-banyak-bumn-karya-terbelit-utang-besar>.
- . “Minim Dampak Proyek Unggulan.” Jakarta: Tempo, 1 Januari 2024. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/486451/rendah-dampak-proyek-infrastruktur-unggulan>.
- Tim CNN Indonesia. “RAPBN 2024, Belanja Negara Naik Tajam Buat Bangun IKN hingga PSN.” Jakarta: CNN Indonesia, 16 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230816185822-532-987013/rapbn-2024-belanja-negara-naik-tajam-buat-bangun-ikn-hingga-psn>.
- Yohanes Paskalis. “Bertumpu pada BUMN di IKN.” Jakarta: Tempo, 27 Januari 2023. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/479876/bagiamana-andil-bumn-di-proyek-ikn>.
- . “Kendala Berlapis Proyek Strategis.” Jakarta: Tempo, 27 Desember 2022. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/479206/deretan-kendala-proyek-psn>.